

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era yang semakin berkembang ini, salah satu tuntutan bagi sebuah negara berkembang adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan terlaksana dengan baik apabila ada koordinasi dari segenap masyarakatnya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia atau individu seutuhnya dan masyarakat seluruhnya.

Masyarakat Desa sebagai komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2010 : 28). Pengertian dari masyarakat itu sendiri adalah sekumpulan manusia yang saling “berhubungan” atau dengan istilah ilmiah yaitu saling “berinteraksi” sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan untuk bisa ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat tersebut. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian mendarah daging pada setiap warganya, sehingga membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Soerjono Soekanto, 2006 : 22).

Di dalam masyarakat, dapat dikemukakan dua macam keadaan : (1) terdapat kemiskinan sekaligus kesenjangan, atau (2) tidak terdapat kemiskinan tapi masih ada kesenjangan. Upaya penanggulangan kemiskinan sangat kompleks dan rumit, dan upaya menanggulangi kemiskinan sekaligus kesenjangan jauh lebih kompleks dan lebih rumit Sunyoto Usman (2008:33-40).

Secara teoritis, faktor penting lain yang ditengarai membuat desa menjadi tidak berdaya adalah produktivitas yang rendah dan sumber daya manusia yang lemah. Perbandingan antara

hasil produksi dan jumlah penduduk menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga dapat berjalan seperti apa yang sudah dicita-citakan.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Kajian keadaan pedesaan secara partisipatif adalah salah satu tahap dalam upaya meningkatkan kemandirian, hasil panen dan kesejahteraan masyarakat dalam hidupnya. Kajian keadaan pedesaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan percaya diri masyarakat dalam mengidentifikasi serta menganalisa situasi, potensi dan masalahnya sendiri. Dalam kajian keadaan pedesaan secara partisipatif melalui Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat dapat memanfaatkan informasi dan hasil kajian yang dilakukan bersama oleh masyarakat bersama tim fasilitator, untuk mengembangkan rencana kerja masyarakat petani agar lebih maju dan mandiri.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, pemberdayaan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002).

Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan untuk merumuskannya sendiri melalui sebuah proses pembangunan konsensus diantara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan menanggung resiko langsung (*stakeholders*) akibat adanya proses atau intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik.

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Sumodingrat (2009:7), yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki relasi sosial maupun ekonomi, maka

pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara bersama-sama.

Jim Ife (1995:56) mengungkapkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*)

Ukuran keberhasilannya adalah kemajuan fisik atau luasan tanaman, yang belum menyentuh pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) petani dan kelembagaan, belum memanfaatkan kearifan tradisional sebagai modal sosial (*social capital*), belum mengakomodasi tata nilai dan kelembagaan informal masyarakat lokal sebagai pondasi kelembagaan formal pengelolaan lahan, serta belum diadaptasikan dengan keragaman karakteristik bio-fisik lokasi, sosial dan budaya masyarakat lokal. Sehingga partisipasi masyarakat dalam pelestarian lahan menjadi sangat minim dan terabaikan.

Akibatnya tingkat keberhasilan pembangunan usaha budidaya tanaman sangat rendah dan sekaligus masyarakat tetap berpenghasilan rendah atau malah menjadi miskin. Efek negatif berikutnya kemiskinan tersebut telah memicu semakin maraknya penebangan liar, perambahan kawasan, dan lain-lain yang semakin mengakibatkan parahnya kerusakan lahan. Sementara itu keberadaan dan ketergantungan masyarakat lokal terhadap sumber daya alam sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan tanaman pertanian atau pengelolaan lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat petani atau pembangunan tanaman pertanian dan sasaran pengelolaan lahan secara maksimal tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat terlebih khusus untuk kelompok tani merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan membentuk dan merubah perilaku masyarakat melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki. Petani dalam hal ini adalah

pelaku utama yang harus diberdayakan. Paradigma strategi pemberdayaan masyarakat petani perlu dirancang dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat petani secara optimal. Orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu sasaran (petani) agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu atau kelompok.

Dari hal di atas, masyarakat petani di kawasan Desa Kawungsari Kecamatan Salawu yang tergabung dalam program Gapoktan (gabungan kelompok tani) merupakan masyarakat yang perlu diberdayakan. Diharapkan melalui program Gapoktan ini, masyarakat petani dapat lebih berdaya dan dalam segi hasil panen maupun finansial serta kesejahteraan hidupnya dapat meningkat.

Desa Kawungsari terletak di daerah Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Desa Kawungsari ini berada di pelosok jauh dari pusat pemerintahan daerah Kabupaten dan juga akses jalan untuk menuju ke desa tersebut lumayan cukup layak, sehingga masyarakat di desa tersebut seperti terisolasi atau terpencilkan. Kebanyakan masyarakat Desa Kawungsari bekerja sebagai petani hal ini dikarenakan letak dari Desa Kawungsari tersebut hanya bisa untuk pertanian saja, sehingga pendapatan yang masih rendah dan hanya mengandalkan sektor pertanian saja, gaya hidupnya masih sederhana.

Pemberdayaan petani melalui kelembagaan kelompok tani merupakan salah satu metode pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk memungkinkan mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Lembaga kecil ini merupakan suatu bentuk organisasi kerja sama yang membuat masyarakat mampu mengembangkan respon yang sesuai dengan logika dan menjadi suatu wadah yang menyatukan para petani secara horizontal maupun vertikal (Suradisatra 2006:34).



1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyak petani yang tingkat ekonominya masih tergolong rendah.
2. Minimnya pengetahuan ilmu tentang pertanian di era modern.
3. Tidak adanya organisasi untuk mewadahi para petani.
4. Kurangnya sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program kerja Gabungan Kelompok Tani di Desa Kawungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Gabungan Kelompok Tani dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kawungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya?

1.4. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program kerja Gabungan Kelompok Tani di Desa Kawungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Gabungan Kelompok Tani dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kawungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

1.5. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan, terutama ilmu sosiologi serta memperkaya pengetahuan dalam dalam bidang ilmu sosial. Terutama wawasan, informasi serta pengetahuan tentang pe,berdayaan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberi solusi bagi permasalahan yang ada, baik bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan dan masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan.

1.6. Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan

penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)).

Karta Sasmita (dalam Zubaedi, 2013: 79) mengemukakan bahwa pemberdayaan seharusnya melalui tiga arah, yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dan ketiga, melindungi masyarakat (*protection*). Dengan demikian tujuan akhir dari pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan sehingga masyarakat tidak bergantung pada pihak pemberi bantuan seperti pemerintah.

Menurut Suharto dalam (Suharto, 2014:58) secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan

Menurut Parson et.al (dalam Suharto 2014:63) tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

1. Sebuah proses pembanguan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.

2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan diri orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Menurut Parsons et.al dalam (Suharto, 2014: 66-67) dalam konteks pekerjaan sosial Pemberdayaan, pemberdayaan dapat dilakukan tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) : mikro, mezzo, dan makro.

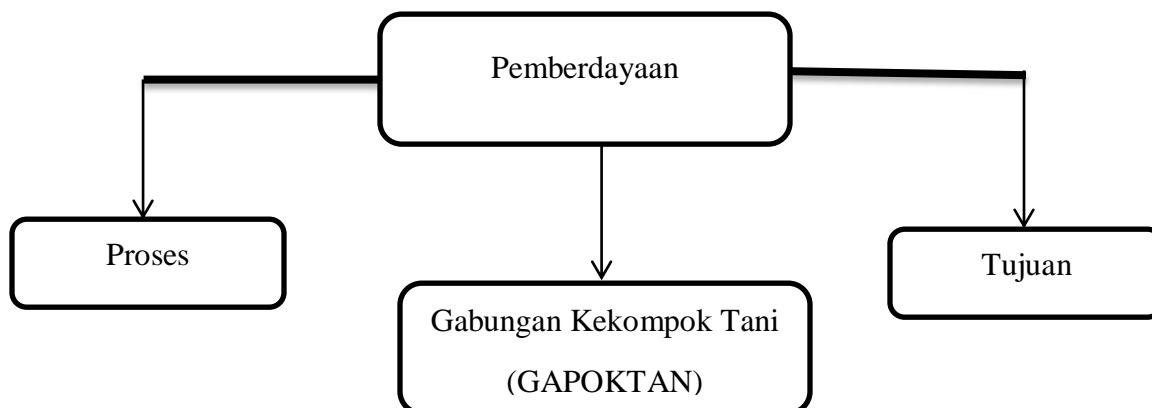
1. Aras Makro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Modal ini sering disebut Sebagai pendekatan yang berpusat pada Tugas (*task centered approach*).
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategi*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

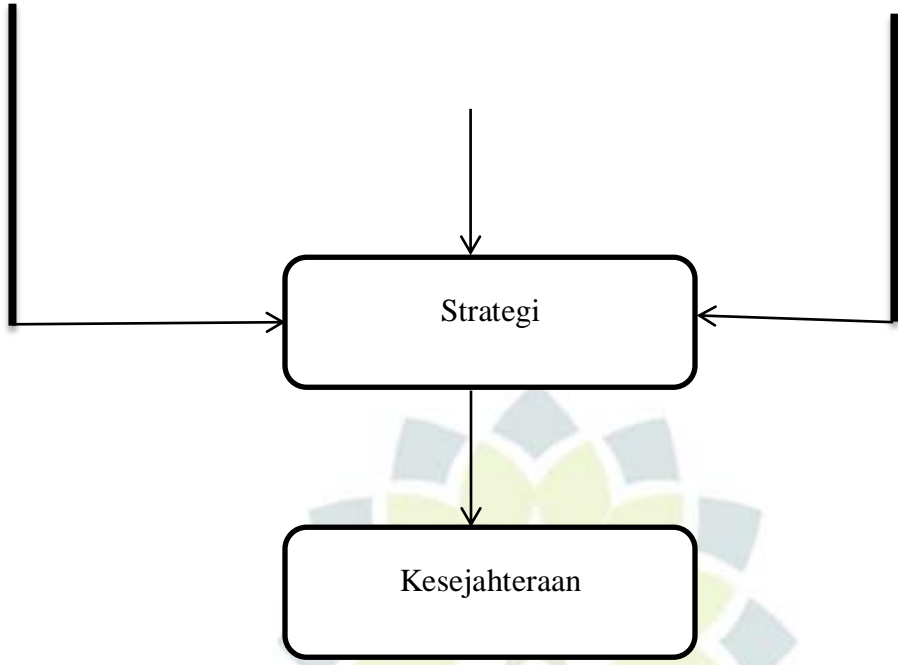
Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan (Suharto, 2014: 60). Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2014: 60).

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat 5P menurut Suharto (2014:67-68) yaitu:

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat – sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan- kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok – kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. **Pemeliharaan:** memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.





uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG